

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju “*good governance*” adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya (*performance*-nya) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018, Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat selama tahun 2016 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut:

- 1 Masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas sebagian besar komoditas perkebunan, yang diperkirakan sebagai akibat dari belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya komoditas perkebunan oleh para pelaku usaha perkebunan, terutama oleh para pelaku usaha perkebunan rakyat yang mendominasi lebih dari 50% usaha perkebunan secara keseluruhan.
- 2 Masih rendahnya pemanfaatan benih unggul tanaman perkebunan bersertifikat, yang diperkirakan sebagai akibat dari terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan benih berkualitas yang dibutuhkan pelaku usaha perkebunan di Jawa Barat.
- 3 Masih tingginya penyusutan lahan perkebunan (-0,416% per-tahun) sebagai akibat dari tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta adanya Gangguan Usaha Perkebunan terutama okupasi lahan perkebunan oleh pihak-pihak tertentu;
- 4 Menurunnya indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) yang diperkirakan oleh belum optimalnya pengembangan management usaha tani dalam mensiasati kondisi pasar dan pengelolaan biaya produksi, sebagai akibat dari belum maksimalnya pembinaan kompetensi SDM dan kemantapan kelembagaan pelaku usaha perkebunan;
- 5 Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman, sebagai akibat dari dampak anomali iklim serta pemanfaatan teknologi budidaya yang kurang ramah lingkungan;
- 6 Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI, sebagai akibat dari pemanfaatan teknologi pasca panen yang belum tepat guna;
- 7 Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat, sebagai akibat dari masih lemahnya daya saing produk perkebunan Jawa Barat.

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2016 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran

APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat, sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, dengan Visi “**Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju Sejahtera dan Berdaya Saing**”, serta dengan 3 (tiga) Misionya yaitu: (1) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, (2) Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan, dan (3) Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan; yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan;
- 2) Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat;
- 3) Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan;
- 4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan;
- 5) Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan;
- 6) Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; serta
- 7) Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu Tahun 2016 tersebut secara kualitatif telah mampu mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi, meskipun secara kuantitatif belum semuanya melampaui target indikator kinerja yang disepakati.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD kepada Gubernur Jawa Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat selama tahun 2016 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LKIP ini.

Dalam LKIP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Jawa Barat pada tahun 2016, yang diselenggarakan melalui 4 (empat) program pokok dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan pokok, serta 7 (tujuh) program penunjang dengan 20 (dua puluh) kegiatan penunjang, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat didukung dengan dana APBN yang dituangkan kedalam 2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan Tugas Pembantuan (TP), serta 2 (dua) program dengan 7 (tujuh) kegiatan Dekonsentrasi (DK). Dalam kaitannya dengan analisis pengukuran kinerja ini, maka yang dijadikan dasar pengukuran adalah terhadap program dan kegiatan pokok APBD maupun APBN saja.

Sedangkan capaian indikator program dan kegiatan penunjang dijadikan sebagai penjelasan tambahan terhadap capaian indikator kinerja secara umum.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP ini didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016;
27. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 45 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

28. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.07-Keu/2016, Tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016;
29. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2.01.02. Tanggal, 7 Januari 2016;
30. Surat Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Nomor : 2.01.02. Tanggal 24 Oktober 2016;
31. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2016, Dana Dekonsentrasi No. DIPA-018.05.3.029101/2016 tanggal 7 Desember 2015;
32. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Bun Tahun Anggaran 2016, Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-018.05.4.029161/2016, tanggal 7 Desember 2015;
33. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Tahun Anggaran 2016 Dana Dekonsentrasi No. DIPA-018.08.3.029026/2016 tanggal 7 Desember 2015;
34. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP Tahun Anggaran 2016 Dana Tugas Pembantuan No. DIPA-018.08.3.029167/2016 tanggal 7 Desember 2015.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi, serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perkebunan, berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan operasional di bidang perkebunan;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perkebunan;
3. Fasilitasi di bidang perkebunan;
4. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik (Tahun 2013-2018)

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, adalah sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu **“Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”**, maka Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 yaitu **“Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”**.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) Misi, sebagai berikut:

- Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,
- Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan,
- Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan pembangunan sub sektor perkebunan Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari Misi tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas.
- 2) Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan Daya Saing Produk Usaha Perkebunan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis (Benefit) dan 45 (empat puluh lima) Indikator Sasaran Program (Outcome), serta 105 (seratus lima) Indikator Sasaran Kegiatan (Output). Adapun untuk 7 sasaran strategis dengan 9 indikator sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: **Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan**, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit):
 - 1) **Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun)**
 - 2) **Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun)**
2. Sasaran Strategis 2: **Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat**, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
 - 3) **Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5% selama 5 tahun)**
 - 4) **Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5% selama 5 tahun),**
3. Sasaran Strategis 3: **Terkendalnya Sumber Daya Lahan Perkebunan**, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
 - 5) **Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13% selama 5 tahun),** dengan indikator sasaran program (Outcome).
4. Sasaran Strategis 4: **Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan**, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
 - 6) **Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1% selama 5 tahun)**
5. Sasaran Strategis 5: **Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan**, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
 - 7) **Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% selama 5 tahun).**

6. Sasaran Strategis 6: **Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI**, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
 - 8) **Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5% selama 5 tahun).**
7. Sasaran Strategis 7: **Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan**, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):
 - 9) **Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama 5 tahun)**

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah dirumuskan 9 (sembilan) Strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Perkebunan;
4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan;
5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;
6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan;
7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;
8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI, dan
9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan sebagai penjabaran dari strategi tersebut, didalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis;
2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman perkebunan;
4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih;

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan;
6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan;
7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan;
8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI; dan
9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

2.1.4. Program dan Kegiatan

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2016, sebagai berikut :

1. Program Pokok APBD TA. 2016

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - 2) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan
 - 3) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
 - 4) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
 - 5) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim
 - 6) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
 - 7) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan
 - 8) Kegiatan DBHCHT - Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau
 - 9) Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Tembakau
 - 10) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau
- b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian, dengan kegiatan:
 - 11) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan
 - 12) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan
 - 13) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya dan Gangguan Usaha Perkebunan
 - 14) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau
 - 15) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
 - 16) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan
 - 17) Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan

- 18) Kegiatan DBHCHT – Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
- 19) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
- 20) Kegiatan CLTH – Pengembangan Tanaman Kelapa
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan, dengan kegiatan:
 - 21) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
 - 22) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau
 - 23) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
- d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan , Perikanan dan Kehutanan, dengan kegiatan:
 - 24) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
 - 25) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 26) Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan
 - 27) Kegiatan CLTH – Demplot Pengolahan Gula Merah

2. Program Penunjang APBD TA. 2016

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Perencanaan di Dinas Perkebunan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - 2) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
 - 4) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
 - 5) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
 - 6) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - 7) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
 - 9) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
 - 10) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)
 - 11) Kegiatan DAK - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)

- 12) Kegiatan DAK - Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
 - 13) Kegiatan DAK - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)
 - e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - 14) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 15) Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP)
 - 16) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP)
 - 17) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB)
 - f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - 18) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan
 - 19) Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perkebunan
 - g. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan:
 - 20) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan
3. **Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN:**
- a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)
 - 2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
 - 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)
 - 4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP)
 - 5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP)
 - 6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)
 - b. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**
 - 1) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)
 - 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP (TP)
4. **Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN:**
- a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK)
 - 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK)
 - 3) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (DK)

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
- 1) Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian (DK)
 - 2) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK)
 - 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (DK)

Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategik Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

| Visi | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing | | | | | | | | |
| Misi 1 Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan | | | | Misi 2 Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan secara Berkelanjutan | | Misi 3 Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan | | |
| Tujuan 1 Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas | | | | Tujuan 2 Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan | | Tujuan 3 Meningkatkan Daya Saing Produk Perkebunan | | |
| Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | | Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | | Sasaran 3 Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | Sasaran 5 Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | Sasaran 6 Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | Sasaran 7 Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan |
| Indikator 1 Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%) | Indikator 2 Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-2,5%) | Indikator 3 Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis (2,1-2,5%) | Indikator 4 Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (2,1-2,5%) | Indikator 5 Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (13%) | Indikator 6 Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (1%) | Indikator 7 Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%) | Indikator 8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-2,5%) | Indikator 9 Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5%) |
| Strategi 1 Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas perkebunan | Strategi 2 Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan | Strategi 3 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman Perkebunan | Strategi 4 Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan | Strategi 5 Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan | Strategi 6 Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku dan kelembagaan usaha Perkebunan | Strategi 7 Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT | Strategi 8 Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI | Strategi 9 Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan |
| Kebijakan 1 Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis | Kebijakan 2 Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan | Kebijakan 3 Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman perkebunan | Kebijakan 4 Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan | Kebijakan 5 Peningkatan koordinasi penanganann penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi | Kebijakan 6 Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan | Kebijakan 7 Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan | Kebijakan 8 Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | Kebijakan 7 Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Jaringan Peredaran Benih | sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan | | | | |
| Program | Program | Program | Program | Program | Program | Program | Program | Program |
| 1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) | 1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) | 1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) | 1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD) | 1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD) | 1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD) | 1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD) | 1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD) | 1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD) |
| 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) | 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN) | 2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN) |
| | | | | 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | | | 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) | 3. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN) |
| Program Penunjang | | | | | | | | |
| 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan 7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah. | | | | | | | | |

Keterangan: Selengkapnya mengenai skema indikator kinerja ini dapat dilihat dalam tabel Cascading terlampir.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.1 tersebut di atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2016 sendiri adalah terdiri dari 50 outcome dan 130 output dengan anggaran sebesar Rp. 88.277.280.223 yang dijabarkan dalam 13 program dan 62 kegiatan baik APBD maupun APBN, sebagaimana dijelaskan dalam tabel terlampir.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, adalah sebagai berikut:

2.3.1. Perjanjian Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Gubernur), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2016
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1) Prosentase Peningkatan Produksi Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan (%) | 2,3 |
| | | 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas Rata-Rata Komoditas Strategis Perkebunan (%) | 2,3 |
| 2. | Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 3) Prosentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Strategis (%) | 2,3 |
| | | 4) Prosentase Peningkatan Benih Tanaman Perkebunan Yang Tersertifikasi (%) | 2,3 |
| 3. | Terkendalnya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 5) Prosentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan Terhadap Luas Jawa Barat (%) | 13,0 |
| 4. | Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%) | 1,0 |
| 5. | Menurunnya Intensitas Serangan OPT Perkebunan | 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%) | -1,0 |
| 6. | Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | 8) Prosentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (%) | 2,3 |
| 7. | Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%) | 2,3 |

2.3.2. Perjanjian Kinerja Program (Outcome)

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome) yang berjumlah 50 indikator.

Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran strategis. Adapun untuk tahun 2016 ini Perjanjian Kinerja Program yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2016
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1.1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan | 1.1.1 | Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (Ton) | 379.860 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.1.2 | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/Kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi) | 21 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.1.3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%) | 70 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.1.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (dok) | 3 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.1.5 | Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok) | 3 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | 1.2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan | 1.2.1. | Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%) | 100 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.2.2. | Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot/Demfarm/Dem Area) (Lokasi) | 2 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.2.3. | Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%) | 70 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.2.4. | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok) | 2 | Kabid Produksi Perkebunan |
| | | | 1.2.5. | Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok) | 2 | Kabid Produksi Perkebunan |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 2.3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan | 2.3.1 | Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang) | 29.798.921 | Kepala UPTD BPBTP |
| | | | 2.3.2 | Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi) | 5 | Kepala UPTD BPBTP |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | benih unggul komoditas strategis | 2.3.3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%) | 70 | Kepala UPTD BPBTP |
| | | | 2.3.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok) | 2 | Kepala UPTD BPBTP |
| | | | 2.3.5 | Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok) | 2 | Kepala UPTD BPBTP |
| | | 2.4. Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi | 2.4.1 | Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang) | 29.796.921 | Kepala UPTD BSPMB |
| | | | 2.4.2 | Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota) | 6 | Kepala UPTD BSPMB |
| | | | 2,4,3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%) | 70 | Kepala UPTD BSPMB |
| | | | 2,4.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok) | 2 | Kepala UPTD BSPMB |
| | | | 2.4.5 | Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yg tersedia (dok) | 2 | Kepala UPTD BSPMB |
| | | | | | | |
| 3 | Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 3.5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat | 3.5.1 | Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha) | 482.238 | Kepala Bidang Bangdal |
| | | | 3.5.2 | Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota) | 12 | Kepala Bidang Bangdal |
| | | | 3,5,3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%) | 70 | Kepala Bidang Bangdal |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | | 3.5.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan (dok) | 3 | Kepala Bidang Bangdal |
| | | | 3.5.5 | Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana dan Pengendalian Perkebunan yg tersedia (dok) | 3 | Kepala Bidang Bangdal |
| 4 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 4.6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) | 4.6.1 | Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin) | 102 | Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan |
| | | | 4.6.2 | Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan SDM, Kelembagaan dan akses Permodalan perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota) | 13 | Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan |
| | | | 4.6.3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%) | 70 | Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan |
| | | | 4.6.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok) | 3 | Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan |
| | | | 4.6.5 | Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok) | 3 | Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan |
| 5 | Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | 5.7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan | 5.7.1 | Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%) | 10 | Kepala UPTD BPTP |
| | | | 5.7.2 | Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota) | 15 | Kepala UPTD BPTP |
| | | | 5,7,3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT Perkebunan (%) | 70 | Kepala UPTD BPTP |
| | | | 5,7.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok) | 2 | Kepala UPTD BPTP |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| | | | 5.7.5 | Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok) | 2 | Kepala UPTD BPTP |
| 6 | Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | 6.8 Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI | 6.8.1 | Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org) | 52 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 6.8.2 | Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota). | 5 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 6.8.3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%) | 70 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 6.8.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok) | 2 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 6.8.5 | Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok) | 2 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| 7 | Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 7.9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan | 7.9.1 | Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%) | 5 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 7.9.2 | Prosentase Tingkat Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Produk Perkebunan Jawa Barat (%) | 70 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 7,9,3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%) | 70 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| | | | 7,9.4 | Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan (dok) | 1 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| | | | | 7.9.5 | Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk Perkebunan yg tersedia (dok) | 1 | Kepala Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan |
| 8 | Meningkatnya kualitas capaian kinerja pembangunan perkebunan | 0.0 | Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%) (62,5-75%) | 0.0.1. | Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%) | 100 | Sekretaris |
| | | | | 0.0.2. | Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%) | 100 | Sekretaris |
| | | | | 0.0.3. | Prosentase penanganan pelayanan publik , sesuai SOP (%) | 70 | Sekretaris |
| | | | | 0.0.4. | Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%) | 100 | Sekretaris |
| | | | | 0.0.5. | Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok) | 3 | Sekretaris |

2.3.3. Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output)

Perjanjian Kinerja Kegiatan adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala Unit Kerja Esselon III dengan Kepala Seksi atau Kasubag pada masing-masing Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Kegiatan (Output), yang berjumlah 130 indikator output.

Perjanjian Kinerja Kegiatan ini sebagai dasar pengukuran kinerja kegiatan yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran outcome dan indikator strategis. Adapun untuk tahun 2016 ini Perjanjian Kinerja Kegiatan yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2016
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1.1. | Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan | 1.1.1 | Jumlah Produksi Komoditas Strategis Perkebunan (Ton) | 1.1.1.1 | Luas lahan peningkatan produksi tanaman tahunan | 3.200 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.1.1.2 | Luas lahan peningkatan produksi tanaman semusim | 1850 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | | | 1.1.1.3 | Jumlah Laporan pemantauan, penyaluran dan penggunaan sarana budidaya (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Lap) | 6 | Kepala Seksi Sarana Produksi |
| | | | | 1.1.2 | Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi program/Kegiatan peningkatan produksi perkebunan (lokasi) | 1.1.2.1 | Jumlah Kaji Terap Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi) | 36 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.1.2.2 | Jumlah Kaji Terap Peningkatan Produksi Tanaman semusim (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lokasi) | 15 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | | | 1.1.2.3 | Jumlah Laporan Kaji Terap Pengembangan sarana budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot, Demfarm, Demarea) (Lap) | 5 | Kepala Seksi Sarana Produksi |
| | | | | 1.1.3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja peningkatan produksi tanaman perkebunan dan pengembangan sarana produksi (%) | 1.1.3.1 | Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.1.3.2 | Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Produksi Tanaman semusim (Lap) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | | | 1.1.3.3 | Jumlah Laporan Sosialisasi, Pembinaan Teknis dan Koordinasi fasilitasi sarana budidaya Tanaman Perkebunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Sarana Produksi |
| | | | | 1,1.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Peningkatan Produksi tanaman Perkebunan (dok) | 1.1.4.1 | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produksi tanaman tahunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.1.4.2 | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan Produksi tanaman semusim (Dok) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | | | 1.1.4.3 | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan sarana budidaya tanaman perkebunan (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Dok) | 4 | Kepala Seksi Sarana Produksi |
| | | | | 1,1.5 | Data Based produksi, teknik budidaya dan sarana budidaya tanaman perkebunan yg tersedia (dok) | 1.1.5.1 | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produksi tanaman tahunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.1.5.2 | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produksi tanaman semusim (Dok) | 1 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | | | 1.1.5.3 | Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data sarana budidaya perkebunan (Bibit, Pupuk, Obat dan Alsintan) (Dok) | 1 | Kepala Seksi Sarana Produksi |
| | | 1.2. | Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan | 1.2.1. | Tingkat Capaian Target Produktivitas rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%) | 1.2.1.1 | Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan (Demplot/Demfarm/Dem Area) (Lokasi) | 10 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.2.1.2 | Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim (Demplot/Demfarm/Dem Area) (Lokasi) | 5 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | 1.2.2. | Jumlah Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan (Demplot/Demfarm/Dem Area) (Lokasi) | 1.2.2.1 | Jumlah identifikasi keunggulan teknologi kearifan lokal pada tanaman tahunan (Lap) | 1 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.2.2.2 | Jumlah identifikasi keunggulan teknologi kearifan lokal pada tanaman semusim (Lap) | 1 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | 1,2,3, | Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan produktivitas tanaman perkebunan (%) | 1.2.3.1. | Jumlah penilaian berkala produktivitas tanaman tahunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.2.3.2. | Jumlah penilaian berkala produktivitas tanaman semusim (Lap) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | 1,2,4, | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (dok) | 1.2.4.1. | Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman tahunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.2.4.2. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan produktivitas tanaman semusim (Dok) | 4 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| | | | | 1,2,5. | Database pemanfaatan teknologi dan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan yg tersedia (dok) | 1.2.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produktivitas tanaman tahunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Tanaman Tahunan |
| | | | | | | 1.2.5.2. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan produktivitas tanaman semusim (Dok) | 1 | Kepala Seksi Tanaman Semusim |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 2.3. | Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis | 2.3.1 | Jumlah benih unggul Komoditas Strategis perkebunan yang tersedia (pohon/batang) | 2.3.1.1. | Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersalurkan (Phn/Btg) | 1.300.000 | Kepala Seksi Pemasaran Benih |
| | | | | | | 2.3.1.2. | Jumlah hasil Identifikasi potensi sumber daya genetik (Plasma Nutfah) tanaman perkebunan (Jenis) | 1 | Kepala Seksi Pengembangan Benih |
| | | | | | | 2.3.1.0. | Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok) | 1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP |
| | | | | 2.3.2 | Jumlah Kebun Sumber Benih tanaman perkebunan sesuai SPM (Lokasi) | 2.3.2.1. | Jumlah Pembinaan Penangkar Benih perkebunan (penangkar) | 70 | Kepala Seksi Pemasaran Benih |
| | | | | | | 2.3.2.2. | Jumlah Kaji Terap Pengembangan Teknologi Pembenihan (Paket) | 1 | Kepala Seksi Pengembangan Benih |
| | | | | | | 2.3.2.3. | Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap) | 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP |
| | | | | 2,3,3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja pengembangan teknologi perbenihan dan pemasaran benih tanaman perkebunan (%) | 2.3.3.1. | Jumlah Kab/Kota yang sudah menerapkan sistem manajemen pemasaran benih perkebunan (Kab/Kota) | 3 | Kepala Seksi Pemasaran Benih |
| | | | | | | 2.3.3.2. | Jumlah Laporan Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih (lap) | 5 | Kepala Seksi Pengembangan Benih |
| | | | | | | 2.3.3.0. | Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap) | 12 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | 2.3.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan teknologi dan Pemasaran Benih (dok) | 2.3.4.1. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pembinaan penangkar dan sistem pemasaran benih tanaman perkebunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Pemasaran Benih |
| | | | | | | 2.3.4.2. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan teknologi pembenihan tanaman perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Pengembangan Benih |
| | | | | | | 2.3.4.0. | Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP |
| | | | | 2.3.5 | Database Sumber Daya Genetik, produksi benih, Teknologi Perbenihan dan Profil Penangkar Benih yg tersedia (dok) | 2.3.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis profil penangkar dan pemasaran benih tanaman perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pemasaran Benih |
| | | | | | | 2.3.5.2 | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya genetik serta pengembangan produksi benih tanaman perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengembangan Benih |
| | | | | | | 2.3.5.0. | Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap) | 1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPBTP |
| | | 2.4. | Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi | 2.4.1 | "Jumlah benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sesuai SOP (pohon/batang) " | 2.4.1.1. | Jumlah Penanganan kasus Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yang tdk bersertifikat (Kasus) | 3 | Kepala Seksi Pengawasan Benih |
| | | | | | | 2.4.1.2. | Jumlah pelayanan pengujian dan sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Pohon/batang) | 29.798.921 | Kepala Seksi Pengujian Benih |
| | | | | | | 2.4.1.3. | Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok) | 1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB |
| | | | | 2.4.2 | Jumlah Kab/Kota yang aktif melakukan pengawasan peredaran benih bersertifikat sesuai SPM (Kab/Kota) | 2.4.2.1. | Jumlah jalinan kerjasama pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (kali) | 1 | Kepala Seksi Pengawasan Benih |
| | | | | | | 2.4.2.2. | Jumlah kajian terap teknik pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Dok) | 2 | Kepala Seksi Pengujian Benih |
| | | | | | | 2.4.2.3. | Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap) | 12 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | 2,4,3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan (%) | 2.4.3.1. | Jumlah Kajian teknik penanganan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (Dok) | 2 | Kepala Seksi Pengawasan Benih |
| | | | | | | 2.4.3.2. | Jumlah Jalinan kerjasama antar kelembagaan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Kali) | 1 | Kepala Seksi Pengujian Benih |
| | | | | | | 2.4.3.3. | Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap) | 12 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB |
| | | | | 2,4.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan sertifikasi, pengawasan mutu dan peredaran benih (Dok) | 2.4.4.1. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Pengawasan Benih |
| | | | | | | 2.4.4.2. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan Pengujian mutu dan sertifikasi benih tanaman perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Pengujian Benih |
| | | | | | | 2.4.4.3. | Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB |
| | | | | 2.4.5 | Database Pelayanan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan yg tersedia (dok) | 2.4.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengawasan Benih |
| | | | | | | 2.4.5.2. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pelayanan pengujian dan sertifikasi benih tanaman perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengujian Benih |
| | | | | | | 2.4.5.3. | Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap) | 1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BSPMB |
| 3 | Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 3.5. | Prosentase Luas minimum eksisting lahan | 3.5.1 | Luas Minimum Eksisting potensi Lahan Perkebunan yg mampu terkendalikan, sesuai RTRW (Ha) | 3.5.1.1. | Jumlah kajian Penataan kawasan dan Pelestarian Lahan Perkebunan (Dok) | 3 | Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.1.2. | Jumlah hasil pembangunan prasarana perkebunan (jalan produksi, sumber Air dan antisipasi Anomali Iklim) (lokasi) | 9 | Kepala Seksi Prasarana Perkebunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | perkebunan terhadap luas Jawa Barat | | | 3.5.1.3. | Jumlah Laporan Penanganan Kasus Pengendalian Perkebunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan per triwulan |
| | | | | 3.5.2 | Jumlah Kab/Kota yang menerapkan standar pemanfaatan sumber daya perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota) | 3.5.2.1. | Jumlah Kaji Terap penataan lahan perkebunan (Demplot/Demfarm/Demarea) (lokasi) | 4 | Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.2.2. | Jumlah kaji terap pengembangan prasarana perkebunan (Demplot/Demfar/Demarea) (Lokasi) | 4 | Kepala Seksi Prasarana Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.2.3. | Jumlah Laporan Kaji Terap perlindungan tanaman, dampak anomali iklim dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan |
| | | | | 3,5,3 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja penataan lahan, pengembangan prasarana dan pengendalian perkebunan (%) | 3.5.3.1. | Jumlah Perluasan dan optimasi lahan perkebunan (Ha) | 100 | Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.3.2. | Jumlah Jalinan kerjasama dan koordinasi pengembangan prasarana perkebunan (Kali) | 3 | Kepala Seksi Prasarana Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.3.3. | Jumlah Laporan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan kemitraan pengendalian perkebunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan |
| | | | | 3,5,4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan ttg lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan (dok) | 3.5.4.1. | Jumlah Dok telaahan Staff ttg bahan kebijakan Penataan lahan perkebunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.4.2. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan prasarana perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Prasarana Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.4.3. | Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan pengendalian perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan |
| | | | | 3.5.5 | Database Potensi Sumber Daya Lahan, Prasarana dan Pengendalian Perkebunan yg tersedia (dok) | 3.5.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya lahan perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Penataan Lahan Perkebunan |
| | | | | | | 3.5.5.2. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis prasarana perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Prasarana Perkebunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | | | 3.5.5.3. | Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data pengendalian perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengendalian Perkebunan |
| 4 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 4.6. | Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) | 4.6.1 | Rata-rata capaian Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), sesuai data BPS (poin) | 4.6.1.1. | Jumlah Hasil Pembinaan Kompetensi SDM Pelaku Usaha Perkebunan melalui Diklat, Bimtek, Magang, dlsb. (Org) | 3275 | Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.1.2. | Jumlah Poktan/Gapoktan perkebunan yang meningkat status kelembagaannya (unit) | 135 | Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.1.3. | Jumlah kegiatan pembinaan akses permodalan pelaku usaha perkebunan ke lembaga keuangan (lap) | 5 | Kepala Seksi Permodalan |
| | | | | 4.6.2 | Prosentase Rata-rata capaian kinerja pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan peningkatan akses Permodalan (%) | 4.6.2.1. | Jumlah Pencetakan Wira Usaha Baru bidang Perkebunan (Org) | 750 | Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.2.2. | Jumlah stakeholders (Asosiasi dlsb) yang terfasilitasi pembinaan kelembagaannya (Unit) | 135 | Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.2.3. | Jumlah Laporan kegiatan percontohan pembinaan akses permodalan usaha perkebunan (Lap) | 3 | Kepala Seksi Permodalan |
| | | | | 4,6,3 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan Pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan akses permodalan (dok) | 4.6.3.1. | Jumlah kajian metode peningkatan kompetensi SDM Perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.3.2. | Jumlah prestasi poktan/gapoktan dan pelaku usaha binaan di bidang perkebunan (buah) | 4 | Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.3.3. | Jumlah Laporan sosialisasi, pembinaan, koordinasi dan kemitraan akses permodalan usaha perkebunan (Lap) | 4 | Kepala Seksi Permodalan |
| | | | | 4,6,4 | Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok) | 4.6.4.1. | Jumlah Dok telaahan Staff ttg bahan kebijakan pengembangan SDM Perkebunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.4.2. | Jumlah DokTelaahan Staff tentang bahan kebijakan penguatan kelembagaan | 4 | Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | | | | (poktan/gapoktan/asosiasi) perkebunan (Dok) | | |
| | | | | | | 4.6.4.3. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan peningkatan akses permodalan perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Permodalan |
| | | | | 4.6.5 | Database pembinaan SDM, Penguatan Kelembagaan dan Akses Permodalan yg tersedia (dok) | 4.6.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis peningkatan kompetensi SDM perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengembangan SDM Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.5.2. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis kelembagaan usaha perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Kelembagaan Perkebunan |
| | | | | | | 4.6.5.3. | Jumlah Dok Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisis data akses permodalan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Permodalan |
| 5 | Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | 5.7. | Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan | 5.7.1 | Proporsi luas wilayah yang terindikasi serangan OPT Perkebunan, sesuai luas eksisting perkebunan (%) | 5.7.1.1. | Jumlah hasil eksplorasi dan seleksi jenis - jenis agensia hayati musuh alami untuk PHT perkebunan (jenis) | 7 | Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.1.2. | Luas penanggulangan OPT melalui penerapan teknologi PHT tanaman perkebunan (Ha) | 670 | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.1.3. | Jumlah rancangan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan perkebunan pada Balai, sesuai SOP (Dok) | 1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP |
| | | | | 5.7.2 | Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pengendalian hama terpadu sesuai SPM (Kab/Kota) | 5.7.2.1. | Jumlah pengujian kualitas agensia hayati jenis patogen dan efektivitas ekstrak pestisida nabati (Paket) | 15 | Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.2.2. | Jumlah Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) tanaman perkebunan (Lokasi) | 10 | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.2.3. | Jumlah laporan penanganan administrasi umum dan pelayanan publik pada Balai, sesuai SOP (lap) | 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | 5,7.3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan PHT dan Pengembangan Sarana PHT Perkebunan (%) | 5.7.3.1. | Jumlah pengadaan dan distribusi sarana teknologi PHT tanaman perkebunan (Unit) | 10 | Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.3.2. | Jumlah kab/kota yang melaporkan adanya serangan OPT Perkebunan melalui SIMAKIT (Kab/Kota) | 15 | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.3.3. | Jumlah laporan pelayanan administrasi program/kegiatan dan keuangan, sesuai SOP (lap) | 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP |
| | | | | 5,7.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan pengembangan sarana PHT dan Aplikasi PHT (dok) | 5.7.4.1. | Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan pengembangan sarana OPT tanaman perkebunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.4.2. | Jumlah Dok Telaahan staff ttg bahan kebijakan Pengendalian Hama Terpadu tanaman perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.4.4. | Jumlah dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan fungsi dan peran balai, sesuai SPM (dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP |
| | | | | 5.7.5 | Database serangan OPT, sarana PHT dan aplikasi Pengendalian Hama Terpadu yang tersedia (Dok) | 5.7.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengembangan sarana PHT tanaman perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.5.2. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis aplikasi PHT tanaman perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu |
| | | | | | | 5.7.5.0. | Jumlah Laporan penanganan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Balai, sesuai SOP (Lap) | 1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPTP |
| 6 | Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk | 6.8 | Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem | 6.8.1 | Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI (org) | 6.8.1.1. | Jumlah Produk yang difasilitasi uji mutu Hasil Perkebunan (jenis) | 9 | Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan |
| | | | | | | 6.8.1.2. | Jumlah Kebun yang mendapat pelayanan penilaian status klasifikasi (Lokasi) | 21 | Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan |
| | | | | 6.8.2 | Jumlah Kab/Kota yang menjalankan pembinaan sistem | 6.8.2.1. | Jumlah Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan (Jenis) | 2 | Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | perkebunan sesuai SNI | | jaminan mutu sesuai SNI | | mutu hasil perkebunan sesuai SPM (Kab/Kota). | 6.8.2.2. | Jumlah Pelayanan Rekomendasi Perijinan Usaha Perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan |
| | | | | 6,8,3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja penanganan mutu hasil dan pengembangan usaha perkebunan (%) | 6.8.3.1. | Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang tersalurkan (Poktan) | 5 | Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan |
| | | | | | | 6.8.3.2. | Jumlah jalinan kemitraan pengembangan usaha antar Pelaku Usaha Perkebunan (Kali) | 3 | Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan |
| | | | | 6,8.4 | Jumlah Juknis/pedoman/ bahan kebijakan penanganan mutu hasil dan pembinaan usaha perkebunan (dok) | 6.8.4.1. | Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan pengolahan dan mutu hasil perkebunan (dok) | 4 | Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan |
| | | | | | | 6.8.4.2. | Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan pembinaan pelaku usaha perkebunan dalam peningkatan mutu hasil (Dok) | 4 | Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan |
| | | | | 6.8.5 | Database Mutu Hasil, Sarpras pengolahan dan status kelas kebun yang tersedia (dok) | 6.8.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis penanganan mutu hasil perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan |
| | | | | | | 6.8.5.2. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis pengembangan usaha perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 7.9. | Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan | 7.9.1 | Proporsi Volume Ekspor komoditas Perkebunan Jawa Barat, terhadap total produksi komoditas terkait (%) | 7.9.1.1. | Jumlah inisiasi dan penetrasi peluang ekspor produk perkebunan (kali) | 3 | Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan |
| | | | | 7.9.2 | Prosentase Tingkat Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Produk Perkebunan Jawa Barat (%) | 7.9.2.1. | Jumlah penanganan distribusi komoditas perkebunan antar daerah dan fasilitasi Informasi Pasar (PIP) Produk Perkebunan (Kali) | 15 | Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan |
| | | | | 7,9,3 | Prosentase rata-rata capaian kinerja promosi dan pemasaran produk perkebunan (%) | 7.9.3.1. | Jumlah tindak lanjut hasil promosi produk perkebunan di dalam dan luar negeri (kali) | 4 | Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan |
| | | | | 7,9.4 | Jumlah Juknis/Pedoman/ bahan kebijakan distribusi, promosi dan pemasaran produk perkebunan (dok) | 7.9.4.1. | Jumlah Dok Telaahan Staff ttg bahan kebijakan pemasaran hasil perkebunan (Dok) | 4 | Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan |
| | | | | 7.9.5 | Database ekspor, promosi dan Informasi Pasar Produk Perkebunan yg tersedia (dok) | 7.9.5.1. | Jumlah Data inventarisasi, identifikasi dan analisis promosi/pemasaran hasil perkebunan (Dok) | 1 | Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 8 | Meningkatnya kualitas capaian kinerja pembangunan perkebunan | 0.0 | Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (%) (62,5-75%) | 0.0.1. | Prosentase penyelesaian Dokumen Standar OPD tepat waktu sesuai SOP (%) | 0.0.1.1. | Jumlah dokumen perencanaan, laporan monitoring/evaluasi serta data informasi pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok) | 5 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program |
| | | | | | | 0.0.1.2. | Jumlah dokumen umum, surat masuk/keluar dan pelayanan publik, sesuai SOP (Dok) | 3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
| | | | | | | 0.0.1.3. | Jumlah dokumen administrasi keuangan tepat waktu, sesuai SOP (jenis) | 2 | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| | | | | 0.0.2. | Prosentase penanganan pelayanan administrasi internal opd tepat waktu, sesuai SOP (%) | 0.0.2.1. | Jumlah penanganan koordinasi perencanaan serta pelaporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Pembangunan Perkebunan, sesuai SOP (Dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program |
| | | | | | | 0.0.2.2. | Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian(pangkat, KGB) tepat waktu dan peningkatan pembinaan aparatur, sesuai SOP (Dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
| | | | | | | 0.0.2.3. | Jumlah pelayanan administrasi keuangan program/kegiatan dan pelayanan keuangan BTL (Gaji/Tunjangan) PNS tepat waktu, sesuai SOP (Dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| | | | | 0.0.3. | Prosentase penanganan pelayanan publik , sesuai SOP (%) | 0.0.3.1. | Jumlah penanganan pelayanan data informasi program/kegiatan pembangunan perkebunan melalui berbagai media informasi publik (kali) | 12 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program |
| | | | | | | 0.0.3.2. | Jumlah penanganan pelayanan informasi umum OPD melalui berbagai media informasi publik (kali) | 12 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
| | | | | | | 0.0.3.3. | Jumlah penanganan pelayanan informasi publik tentang keuangan, sesuai sop (kali) | 12 | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| | | | | 0.0.4. | Prosentase penyelesaian koordinasi eksternal opd sesuai SOP (%) | 0.0.4.1. | Jumlah koordinasi, suvervisi, sinkronisasi, harmonisasi program/keg antar OPD terkait, sesuai SOP (kali) | 12 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program |
| | | | | | | 0.0.4.2. | Jumlah koordinasi antar opd terkait tentang kepegawaian dan aset OPD (Kali) | 12 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
| | | | | | | 0.0.4.3. | Jumlah koordinasi penyelesaian administrasi dan audit keuangan opd, sesuai SOP (Dok) | 12 | Kepala Sub Bagian Keuangan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Program (Outcome) | | Indikator Kinerja Kegiatan (Output) | | Target 2016 | Penanggung Jawab |
|----|-------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | 0.0.5. | Jumlah Juklak/Juknis/SOP tentang peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan OPD (Dok) | 0.0.5.1. | Jumlah Telaahan Staf ttg bahan kebijakan penyusunan program/kegiatan, monitoring/evaluasi, serta data dan informasi pembangunan (dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program |
| | | | | | | 0.0.5.2. | Jumlah Dok telaahan staff ttg bahan kebijakan peningkatan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana aparatur, sesuai SPM (dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum |
| | | | | | | 0.0.5.3. | Jumlah Dok telaahan staf ttg bahan kebijakan pengelolaan keuangan pembangunan perkebunan, sesuai SPM (Dok) | 4 | Kepala Sub Bagian Keuangan |

2.4. Pagu Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2016

Dalam Tahun 2016, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat secara keseluruhan difasilitasi oleh 7 Program Wajib dengan 20 Kegiatan, serta 4 Program Pilihan dengan 27 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN yang terdiri dari 2 Program dan 8 Kegiatan untuk Tugas Pembantuan (TP), serta 2 Program dan 7 Kegiatan untuk Dekonsentrasi (DK).

Tabel 2.5
Pagu Program/Kegiatan
APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2016

| No | Program/ Kegiatan | Jml Anggaran (Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | TOTAL APBD | 44.495.611.842 |
| | URUSAN WAJIB | 19.061.928.000 |
| 1 | Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah | 465.000.000 |
| | 1. Kegiatan Perencanaan di Dinas Perkebunan | 465.000.000 |
| 2 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 968.500.000 |
| | 2. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur | 968.500.000 |
| 3 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.087.038.000 |
| | 3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran | 1.464.200.000 |
| | 4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP | 473.800.000 |
| | 5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP | 689.038.000 |
| | 6. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BSPMB | 460.000.000 |
| 4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9.608.525.000 |
| | 7. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.001.343.750 |
| | 8. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP | 1.283.643.750 |
| | 9. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPBTP | 1.069.343.750 |
| | 10. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BSPMB | 854.193.750 |
| | 11. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (DAK) | 2.025.000.000 |
| | 12. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor UPTD BPBTP (DAK) | 2.250.000.000 |
| | 13. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BSPMB (DAK) | 1.125.000.000 |
| 5 | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.846.500.000 |
| | 14. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.350.000.000 |
| | 15. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP | 900.000.000 |
| | 16. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP | 891.000.000 |
| | 17. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2MB | 705.500.000 |
| 6 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 376.550.000 |
| | 18. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan | 278.550.000 |
| | 19. Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perkebunan | 98.000.000 |
| 7 | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | 709.815.000 |
| | 20. Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Perkebunan | 709.815.000 |
| | URUSAN PILIHAN | 25.433.683.842 |
| 8. | Program Peningkatan Produksi Pertanian | 14.080.739.792 |
| | 21. Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan | 7.929.687.016 |
| | 22. Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan | 469.577.776 |
| | 23. Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan | 875.500.000 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016*

| No | Program/ Kegiatan | Jml Anggaran (Rp) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 24. Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan | 995.000.000 |
| | 25. Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM IP) | 899.200.000 |
| | 26. Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan | 993.175.000 |
| | 27. Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan | 473.000.000 |
| | 28. Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT) | 498.000.000 |
| | 29. Kegiatan Penangkar Benih Tanaman Tembakau (DBHCHT) | 460.600.000 |
| | 30. Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau (DBHCHT) | 487.000.000 |
| 9. | Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian | 6.005.710.000 |
| | 31. Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan | 998.100.000 |
| | 32. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan | 473.300.000 |
| | 33. Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan | 999.000.000 |
| | 34. Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau | 499.360.000 |
| | 35. Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebuna | 493.200.000 |
| | 36. Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru bidang Perkebunan (RAM IP) | 988.720.000 |
| | 37. Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan | 460.970.000 |
| | 38. Kegiatan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT) | 452.940.000 |
| | 39. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan | 440.650.000 |
| | 40. Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa (CLTH) | 199.470.000 |
| 10. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan | 1.459.276.050 |
| | 41. Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu | 491.629.000 |
| | 42. Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau | 472.470.000 |
| | 43. Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu | 495.177.050 |
| 11. | Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan | 3.887.958.000 |
| | 44. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan | 450.000.000 |
| | 45. Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan | 2.875.958.000 |
| | 46. Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan | 462.000.000 |
| | 47. Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau | 100.000.000 |

Tabel 2.6
Pagu Program/Kegiatan APBN
Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2016

| No | Program/ Kegiatan | Jml Anggaran (Rp) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | TOTAL | 26.602.184.000 |
| | TUGAS PEMBANTUAN | 22.061.479.000 |
| 1. | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN | 109.571.450.000 |
| | 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP) | 10.927.469.000 |
| | 2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) | 3.415.750.000 |
| | 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) | 737.920.000 |
| | 4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP) | 5.194.000.000 |
| | 5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP) | 601.900.000 |
| | 6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP) | 367.940.000 |
| 2. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN | 816.500.000 |
| | 7) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP) | 400.000.000 |
| | 8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP (TP) | 416.500.000 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016*

| No | Program/ Kegiatan | Jml Anggaran (Rp) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | DANA DEKONSENTRASI | 4.540.705.000 |
| 1. | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | 4.095.005.000 |
| | 1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK) | 742.995.000 |
| | 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK) | 2.771.960.000 |
| | 3) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (DK) | 580.050.000 |
| 2. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | 445.700.000 |
| | 4) Kegiatan Pengelolaan Air irigasi untuk Pertanian (DK) | 30.000.000 |
| | 5) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (DK) | 35.600.000 |
| | 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (DK) | 344.500.000 |
| | 7) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida | 35.600.000 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi) maupun data eksternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Persentase Pencapaian Rencana | = | $\frac{\text{Realisasi Tahun } t}{\text{Target Rencana Tahun } t}$ | x 100 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------|

Rumus 2:

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Persentase Peningkatan/Penurunan capaian Kinerja | = | $\frac{\text{Realisasi Thn } t - \text{Realisasi Thn } t-1}{\text{Realisasi Tahun } t-1}$ | x 100 |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Rumus 3:

| | | | |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------|
| Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya | = | $\frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Tahun } t-1}$ | x 100 |
|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|-------|

Rumus 4:

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah | = | $\frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } n}$ | x 100 |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Rumus 5:

| | | | |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Persentase Perbandingan dengan Nasional | = | $\frac{\text{Realisasi Thn } t}{\text{Realisasi Nasional Thn } t}$ | x 100 |
|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------|

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Nilai diatas 100% dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan baik (B)
- 3) Nilai diatas 55% s/d 80% dengan sebutan cukup (C)
- 4) Nilai dibawah 55% dengan sebutan kurang (K)

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Target Kinerja 2016 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Gubernur Jawa Barat, selama kurun waktu 2016 telah dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1.
Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2016**

| No Misi | Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2016 | Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 | Capaian Kinerja Tahun 2016 Thdp PK (4/5)*100% |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 2,23 | 2,30 | 96,95 |
| | | 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 2,25 | 2,30 | 97,82 |
| | 2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%) | 2,35 | 2,30 | 102,17 |
| | | 4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%) | 2,35 | 2,30 | 102,17 |
| 2. | 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%) | 13,22 | 13,00 | 101,69 |
| | 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%) | 0,985 | 1,00 | 98,50 |
| | 5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%) | -1,02 | -1,00 | 102,03 |
| 3. | 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | 8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%) | 2,22 | 2,30 | 96,52 |
| | 7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%) | 2,20 | 2,30 | 95,65 |
| Rata-rata | | | | | 99,28 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 99,28.

Jika dilihat masing-masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran (1.1) yaitu ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan***, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar 96,95%. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan juga hanya mencapai target kinerja sebesar 97,82%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa terdapat faktor produksi primer yang perannya masih kurang dalam menunjang peningkatan produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja, serta adanya pengaruh faktor produksi sekunder yaitu modal dan entrepreneurship yang disinyalir mempengaruhi optimalisasi peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan di Jawa Barat, sehingga baik secara kualitatif maupun kuantitatif belum melampaui target kinerjanya.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu ***Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat***, dengan indikator (3) yaitu prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis mencapai target kinerja sebesar 102,17 %, sama halnya dengan indikator (4) yaitu prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar 102,17%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mendorong ketersediaan benih unggul bersertifikat, baik yang dilakukan UPTD maupun penangkar benih tanaman perkebunan se Jawa Barat, serta adanya upaya pengawasan peredaran benih yang tidak bersertifikat (benih palsu) di lapangan.
3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu ***Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan***, dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat mencapai target kinerja sebesar 101,69%. Artinya target luas minimal eksisting lahan perkebunan sebesar 13 % atau sebesar 482.238 Ha dari luas Provinsi Jawa Barat (3.709.528,44 Ha), masih bisa dipertahankan pada tahun 2016 karena adanya dukungan program dan kegiatan yang mengarah kepada aspek keberlanjutan dan pelestarian lahan perkebunan sehingga akan meningkatkan produksi dan produktivitas lahan dan tanaman. Hal ini akan memberikan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi pelaku usaha tani perkebunan untuk tetap bergantung pada usaha tani komoditas perkebunan sehingga terhindar dari adanya kecenderungan alih fungsi lahan ke non perkebunan, alih komoditas ke komoditas non perkebunan dan okupasi lahan oleh masyarakat, yaitu sebesar 13,22% atau seluas 490.369 Ha.
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan***, dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) dari target sebesar 1 % hanya tercapai sebesar 0,9850%, atau sebesar 98,50% dari targetnya. Kondisi tersebut disinyalir dipengaruhi oleh persepsi dalam proses pengukuran indeks harga yang diterima

petani (IT), yaitu masih menggunakan nilai produk primer, belum menggunakan nilai produk akhir. Sementara saat ini dominan pelaku usaha tani perkebunan telah mampu memproduksi di atas tahapan produk primer, yang sudah barang tentu memiliki nilai tambah dan harga jual yang lebih tinggi. Disisi lain, adanya kebijakan industri yaitu adanya substitusi oleh barang impor sehingga menyebabkan harga-harga produk industri yang dikonsumsi oleh pelaku usaha tani perkebunan menjadi mahal, atau indeks harga yang dibayar petani (IB) menjadi tinggi. Sementara dalam penentuan NTP-R, perhitungan IB masih berdasarkan pada indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, penambahan barang modal dan biaya produksi.

5. Untuk sasaran (2.3) yaitu **Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan**, dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan mencapai target kinerja sebesar 102,03%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dalam mengendalikan dan menurunkan intensitas serangan OPT perkebunan di Jawa Barat.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu **Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI**, dengan indikator (8) yaitu Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI, mencapai target kinerja sebesar 96,52%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI, belum mencapai target secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan SNI yang pada dasarnya bersifat sukarela termasuk penerapan sistem jaminan mutu bagi produk perkebunan sehingga persepsi masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian SNI merupakan hal yang masih didasarkan atas pertimbangan harga, mengingat biaya pemenuhan penerapan GMP sesuai SOP tidak sebanding dengan indeks harga yang diterima.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu **Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan**, dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 95,65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya optimal untuk mendorong peningkatan volume ekspor dan pengembangan jaringan pemasaran produk perkebunan, seolah-olah belum mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dikarenakan daya saing beberapa produk perkebunan Jawa Barat masih rendah mengingat pasar atau negara tujuan ekspor memiliki standar internasional tertentu yang berbeda bahkan lebih tinggi dari standar produk negara lain, sehingga perlu mencari alternatif negara atau pasar tujuan yang sesuai standar atau spesifikasi produk yang dihasilkan pelaku usaha tani perkebunan. Cara lain dapat juga dengan meningkatkan mutu atau kualitas produk untuk memenuhi standar negara atau pasar tujuan ekspor.

Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2016 tersebut diatas, secara keseluruhan masih diperlukan adanya pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja secara optimal.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2016 dengan capaian kinerja pada Tahun 2015, diperoleh rincian capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2016 Terhadap Tahun 2015**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Realisasi | | Realisasi 2016 Thdp Thn 2015 (5/4)*100 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| | | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 2,15 | 2,23 | 103,72 |
| | | 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 2,19 | 2,25 | 102,74 |
| | 2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%) | 2,27 | 2,35 | 103,52 |
| | | 4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%) | 2,27 | 2,35 | 103,52 |
| 2. | 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%) | 13,14 | 13,22 | 100,61 |
| | 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%) | 0,9619 | 0,9850 | 102,40 |
| | 5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%) | -1,02 | -1,02 | 100,00 |
| 3. | 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | 8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%) | 2,15 | 2,22 | 103,25 |
| | 7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%) | 2,17 | 2,20 | 101,38 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Realisasi | | Realisasi 2016 Thdp Thn 2015 $(5/4)*100$ |
|----|-------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| | | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Rata-rata | | | | 102,35 |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.2 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar 102,35%. Jika dilihat masing-masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran (1.1) yaitu ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan***, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar 103,72% atau lebih besar dari realisasi tahun 2015. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 102,74%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa dari segi pengembangan teknologi budidaya komoditas perkebunan pada tahun 2016, kondisi dan ketersediaan faktor produksi primer seperti sumber daya alam dan tenaga kerja lebih baik dalam menunjang peningkatan produksi dan produktivitas tanaman dibanding kondisi dan ketersediaan pada tahun 2015. Demikian pula halnya dengan faktor produksi sekunder baik berupa modal maupun entrepreneurship kondisi dan ketersediaannya lebih baik pada tahun 2016, sehingga peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif mampu melampaui capaian kinerja tahun 2015.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu ***Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat***, dengan indikator (3) yaitu prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis mencapai target kinerja sebesar 103,52%, sama halnya dengan indikator (4) yaitu prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar 103,52%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD pada tahun 2016 dalam mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat, dan adanya kesadaran dari para petani untuk menggunakan benih unggul bersertifikat untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik.
3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu ***Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan***, dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat mencapai target kinerja sebesar 100,61%. Artinya pada tahun 2016 ada dukungan program dan kegiatan yang mengarah kepada aspek keberlanjutan dan pelestarian lahan perkebunan baik berupa konservasi lahan, peningkatan daya dukung lahan maupun perluasan lahan yang dibiayai

oleh APBN, APBD provinsi, dan APBD Kabupaten sehingga memberikan rasa aman, dan harapan hidup bagi pelaku usaha tani perkebunan dan terpacu untuk tetap mempertahankan lahan perkebunanya bahkan cenderung menambah luas, hal ini berdampak pada capaian kinerja tahun 2016 berada diatas capaian kinerja tahun 2015, dengan kata lain masih mampu melampaui target luas minimal eksisting lahan perkebunan yang harus dipertahankan yaitu sebesar 13 % dari luas Provinsi Jawa Barat (3.709.528,44 Ha) atau dengan luas minimal lahan perkebunan sebesar 482.238 Ha.

4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan***, dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), mencapai target kinerja sebesar 102,40%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan NTP-R dari tahun 2015 tapi masih tetap di bawah target. Kondisi tersebut dikarenakan bahwa iklim perekonomian nasional dan internasional belum memberikan peluang keuntungan bagi pelaku usaha perkebunan, dimana Indeks yang dibayarkan petani (IB) lebih besar dibandingkan dengan Indeks yang diterima oleh petani (IT).
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu ***Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan***, dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan mencapai target kinerja sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya yang lebih optimal yang dilakukan OPD pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, dalam hal mengendalikan dan menurunkan intensitas serangan OPT perkebunan di Jawa Barat.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu ***Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI***, dengan indikator (8) yaitu Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI, mencapai target kinerja sebesar 103,25%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya maksimal yang dilakukan OPD dari tahun 2015 ke tahun 2016 dalam hal meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu ***Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan***, dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan, mencapai target kinerja sebesar 101,38%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah adanya upaya optimal yang dilakukan OPD dari tahun 2015 ke tahun 2016 untuk mendorong peningkatan volume ekspor dan pengembangan jaringan pemasaran produk perkebunan.

Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun 2016 ke tahun 2015 tersebut diatas, secara keseluruhan telah mencapai kinerja diatas 100%, namun masih diperlukan adanya berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap peningkatan capaian indikator kinerja, terutama terkait dengan indikator yang ke (1), (2), dan (6).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016 terhadap target total Renstra OPD 2013-2018

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2013-2016) terhadap total target Renstra di tahun 2018, sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel: 3.3
Pengukuran Pencapaian Kinerja s.d Tahun 2016
Terhadap Target Renstra 2013-2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Realisasi s.d Tahun 2016 (2014+2015+2016) | Target Renstra sd 2018 (2013-2018) | Realisasi sd 2016 Thdp Target Renstra sd 2018 (4/5)*100% |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 6,35 | 11,5 | 55,22 |
| | | 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 6,51 | 11,5 | 56,61 |
| | 2 Meningkatkan Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%) | 6,95 | 11,5 | 60,43 |
| | | 4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%) | 6,95 | 11,5 | 60,43 |
| 2. | 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%) | 13,22 | 13,00 | 101,69 |
| | 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%) | 2,86 | 5 | 57,20 |
| | 5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%) | -3,06 | -5 | 61,20 |
| 3. | 6. Meningkatnya Penerapan | 8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem | 6,41 | 11,5 | 55,74 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Realisasi s.d Tahun 2016 (2014+2015+2016) | Target Renstra sd 2018 (2013-2018) | Realisasi sd 2016 Thdp Target Renstra sd 2018 (4/5)*100% |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | jaminan mutu sesuai SNI (%) | | | |
| | 7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%) | 6,43 | 11,5 | 55,91 |
| | | 62,71 | | | |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang disajikan pada tabel 3.3 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa meskipun pelaksanaan dari Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 tersebut sudah memasuki tahun ketiga rata-rata capaian kinerjanya pada tahun 2016 sudah mencapai **62,71%**. Jika dilihat masing-masing dari ke 9 (sembilan) indikator kinerjanya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran (1.1) yaitu ***Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan***, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai target kinerja sebesar 55,22%. Sedangkan untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, sampai dengan tahun 2016 sudah mencapai target kinerja sebesar 56,61%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya pencapaian target kinerja Renstra 2013-2018 pada sasaran kinerja ini optimis bisa tercapai secara optimal pada tahun 2018.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu ***Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat***, dengan indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis sampai tahun 2016 sudah mencapai target kinerja sebesar 60,43%, sama halnya dengan indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi mencapai target kinerja sebesar 60,43%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target Renstra 2013-2018 tentang capaian penyediaan benih yang bersertifikat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 177.124.046 pohon/batang optimis tercapai secara optimal, berkat upaya bersama yang akan dilakukan antara UPTD maupun penangkar benih tanaman perkebunan se Jawa Barat, serta adanya upaya pengawasan peredaran benih yang tidak bersertifikat (benih palsu) di lapangan.

3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu ***Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan***, dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat. Jika dilihat dari perkembangan penyusutan lahan dalam beberapa tahun terakhir diperkirakan indikator ini yang paling sulit dikendalikan. Sampai dengan tahun 2016 capaian kinerja Renstra untuk indikator ini mencapai 13,22% atau sebesar 101,69% dari target minimalnya, yaitu 13%. Artinya upaya rehabilitasi, peremajaan, optimasi dan perluasan lahan yang telah dilakukan selama 3 tahun ke belakang dapat terus dilakukan pada tahun mendatang, sehingga proporsi keberadaan luas lahan eksisting minimal 13 % dari luas total Jawa Barat pada tahun 2018 optimis bisa tetap dipertahankan.
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan***, dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) sampai posisi tahun 2016 dibandingkan dengan target NTP-R pada tahun 2018 mencapai target sebesar 57,20%. Jika dilihat dari perkembangan kondisi ekonomi makro serta pertimbangan daya saing produk perkebunan terhadap pasar ekspor, maka target indikator NTP Renstra pada tahun 2018 optimis dapat tercapai.
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu ***Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan***, dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan, dimana sampai dengan tahun 2016 ini tercapai sebesar 61,20%. Jika upaya pengendalian luas wilayah yang terkena serangan OPT perkebunan dilakukan secara konsisten setiap tahun, maka target penurunan intensitas serangan sebesar -5% pada tahun 2018 optimis tercapai.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu ***Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI***, dengan indikator (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI, dimana capaian kinerja pada tahun 2016 mencapai sekitar 55,74 %. Dengan pertimbangan upaya OPD yang dapat terus meningkatkan kinerja pembinaan pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu hasil sesuai SNI, maka target kinerja tahun 2018 tersebut optimis dapat tercapai secara optimal.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu ***Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan***, dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan, bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 mencapai target kinerja sebesar 55,91%. Jika melihat perkembangan kondisi perekonomian serta peluang pasar ekspor untuk produk perkebunan Jawa Barat, maka target kinerja tahun 2018 tersebut dapat tercapai secara optimal.

Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun 2014 ke akhir tahun Renstra yaitu tahun 2018 tersebut diatas, maka diperkirakan bahwa target kinerja tersebut dapat dicapai secara optimal pada saatnya. Beberapa indikator kinerja yang diperkirakan mengalami kesulitan untuk mencapa target,

sehingga perlu perhatian khusus untuk melakukan akselerasi, yaitu target kinerja nomor (1), (5), dan (6).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Capaian Nasional Tahun 2016

Kualitas pencapaian target kinerja pembangunan perkebunan Jawa Barat tentu saja perlu diperbandingkan dengan capaian kinerja di tingkat Nasional. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar peran dan prestasi sub sektor perkebunan Jawa Barat di tingkat Nasional. Adapun berdasarkan hasil pengukuran perbandingan kinerja Tahun 2016 terhadap kinerja Nasional, adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Capaian Nasional 2016

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Realisasi Tahun 2016 | Capaian Kinerja dan Standar Nasional | Realisasi 2016 Thdp Capaian kinerja Nasional (4/5)*100% |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan | 1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 2,23 | 2,2 | 101,36 |
| | | 2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan (%) | 2,25 | 2,35 | 95,74 |
| | 2. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat | 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis (%) | 2,35 | 2,2 | 106,82 |
| | | 4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi (%) | 2,35 | 2,2 | 106,82 |
| 2. | 3. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan | 5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat (%) (Tingkat Penyusutan Lahan) | 13,22 | -0,103 | 70,07 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Realisasi Tahun 2016 | Capaian Kinerja dan Standar Nasional | Realisasi 2016 Thdp Capaian kinerja Nasional (4/5)*100% |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan | 6) Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%) | 0,9850 | 0,9929 | 99,20 |
| | 5. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan | 7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (%) | -1,02 | -1 | 102,03 |
| 3. | 6. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI | 8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (%) | 2,22 | 2,2 | 100,91 |
| | 7. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan | 9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Komoditas Strategis Jawa Barat (%) | 2,20 | 3,9 | 56,41 |
| | | | | | 93,24 |

Berdasarkan hasil pengukuran perbandingan antara capaian kinerja tahun 2016 terhadap capaian Nasional sebagaimana yang disajikan dalam tabel 3.4 diatas, bahwa capaian kinerja sub sektor perkebunan Jawa Barat terhadap Nasional adalah sebesar 93,24%, dengan perincian per indikator sebagai berikut:

1. Untuk sasaran (1.1) yaitu **Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan**, dengan indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, dimana berdasarkan hasil perbandingan tersebut posisi peningkatan produksi komoditas strategis Jawa Barat pada tahun 2016 sedikit diatas capaian Nasional yaitu 101,36%. Tetapi untuk indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, posisi Jawa Barat tahun 2016 hanya mencapai 95,74% dari capaian Nasional. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kendala faktor cuaca yang kurang mendukung selama tahun 2016.
2. Untuk sasaran (1.2) yaitu **Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat**, dengan indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis sebesar 106,82% serta indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi sebesar 106,82%. Kondisi ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong perwujudan Jawa Barat sebagai Provinsi Benih.

3. Untuk Sasaran (2.1) yaitu ***Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan***, dengan indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat. Dari indikator ini yang dapat diperbandingkan dengan Nasional adalah perubahan proporsi lahannya, dimana untuk Jawa Barat berdasarkan perhitungan data Statistik tahun 2014-2015 diperoleh tingkat penurunan lahan perkebunan sebesar -0,416 % atau sekitar -5.456 Ha, sedangkan untuk tingkat Nasional terjadi penyusutan lahan sekitar -0,103%. Artinya kondisi perubahan lahan perkebunan di Jawa Barat lebih tinggi dari nasional atau prestasi upaya mempertahankan keberadaan lahan perkebunan masih dibawah nasional (70,07%). Kondisi ini dikarenakan bahwa tekanan alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Barat sangat tinggi sebagai dampak dari meningkatnya kebutuhan lahan perindustrian dan pemukiman.
4. Untuk Sasaran (2.2) yaitu ***Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan***, dengan indikator (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), dimana pada posisi tahun 2016 NTP-R Jawa Barat tercapai sebesar 98,50% sedangkan NTP-R Nasional sebesar 99,29, sehingga NTP-R Jawa Barat dibandingkan dengan NTP-R Nasional adalah sebesar 99,20%. Kondisi ini dimungkinkan oleh karena nilai Indeks yang Diterima (IT) oleh petani perkebunan Jawa Barat masih belum optimal, dalam arti perlu didorong upaya pengembangan nilai tambah pada produk akhir komoditas perkebunan Jawa Barat agar memberikan dampak positif pada peningkatan IT nya. Disamping itu kondisi Indeks yang Dibelanjakan (IB) pada masyarakat pekebun, khususnya menyangkut biaya konsumsi rumah tangga, masih tinggi, dengan tingkat daya beli masyarakat yang masih tertekan oleh kondisi perekonomian nasional, khususnya inflasi.
5. Untuk sasaran (2.3) yaitu ***Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan***, dengan indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan. Untuk Indikator ini Provinsi Jawa Barat mampu melampaui capaian kinerja Nasional sebesar 102,03%. Hal ini sebagai dampak dari upaya pengendalian Hama Terpadu yang dijalankan secara intensif di wilayah perkebunan se Jawa Barat.
6. Untuk sasaran (3.1) yaitu ***Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu Produk Perkebunan sesuai SNI***, dengan indikator (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan Mutu sesuai SNI, dimana posisi Jawa barat pada tahun 2016 tercapai meningkat sebesar 2,22% sedangkan di tingkat Nasional tercapai sekitar 2,2%, sehingga Prestasi Jawa Barat dibandingkan dengan Nasional tercapai sebesar 100,91%.
7. Untuk sasaran (3.2) yaitu ***Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan***, dengan indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan, bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2015 dibandingkan dengan capaian Nasional pada Tahun 2015 untuk komoditas

strategis, hanya sebesar 56,41 %. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya daya saing produk perkebunan Jawa Barat di Pasar Ekspor.

Dari gambaran hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja pada tahun 2016 antara Jawa Barat dengan Nasional secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Jawa Barat masih mampu mengimbangi capaian kinerja Nasional.

3.1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala sebagaimana penjelasan berikut ini:

- 1 Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produksi beberapa komoditas strategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman.
- 2 Dalam pencapaian indikator (2) yaitu Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produktivitas beberapa komoditas strategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat mendorong peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.
- 3 Dalam pencapaian indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis, terdapat kendala berupa terbatas sumber benih untuk peningkatan produksi benih, baik yang dimiliki oleh UPTD maupun masyarakat. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah meningkatkan penilaian dan penetapan Kebun Sumber Benih untuk berbagai komoditas perkebunan binaan Jawa Barat.
- 4 Dalam pencapaian indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi, terdapat kendala berupa banyaknya peredaran benih palsu atau yang tidak bersertifikat. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan peredaran benih.
- 5 Dalam pencapaian indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat, terdapat kendala berupa tingginya penyusutan lahan perkebunan akibat adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah membuat peraturan yang lebih ketat terhadap gejala alih fungsi lahan, serta mendorong petani untuk tidak menjual atau mengalihfungsikan lahannya, dengan cara pemberian insentif bagi petani yang mematuhi aturan tersebut juga dengan adanya dukungan program dan kegiatan yang mengarah kepada aspek keberlanjutan dan pelestarian lahan perkebunan sehingga akan meningkatkan produksi dan produktivitas lahan dan tanaman. Hal ini akan memberikan rasa aman, nyaman, dan harapan bagi pelaku usaha tani perkebunan untuk tetap bergantung pada usaha tani komoditas perkebunan sehingga terhindar dari adanya kecenderungan alih fungsi lahan ke non

perkebunan, alih komoditas ke komoditas non perkebunan dan okupasi lahan oleh masyarakat.

- 6 Dalam pencapaian indikator kinerja (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), terdapat kendala berupa sulitnya menurunkan Indeks yang Dibayarkan Petani (IB) serta menaikkan Indeks yang Diterima Petani (IT). Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan peningkatan kompetensi petani/pekebun agar mampu meningkatkan produktivitas usahanya serta meningkatkan daya saing produknya.
- 7 Dalam pencapaian Indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan, terdapat kendala berupa luasnya wilayah yang terindikasi serangan OPT dibandingkan dengan ketersediaan SDM aparatur pengendalian OPT. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan pembagian peran dengan OPD Kabupaten/Kota yang menangani perkebunan, dalam hal melakukan pengendalian OPT sesuai dengan perwilayahannya.
- 8 Dalam pencapaian indikator kinerja (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan mutu sesuai SNI, terdapat kendala berupa sulitnya membuktikan adanya keterkaitan antara penerapan sistem mutu dengan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah perlu peningkatan pengawasan mutu produk dari lembaga uji mutu sampai ke tingkat unit usaha.
- 9 Dalam pencapaian indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan, terdapat kendala berupa kurangnya daya serap pasar ekspor terhadap produk perkebunan Jawa Barat, yang diperkirakan akibat promosi serta pengembangan jejaring pasar yang efektif dan efisien. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah meningkatkan promosi produk melalui berbagai event strategis, serta didukung dengan pengembangan sistem informasi pasar.

3.1.4. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengaturan/pemetaan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan perkebunan Jawa Barat;

- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta pendudukan prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan, serta pengolahan produk perkebunan.

Dari segi pemanfaatan anggaran pembangunan pada tahun 2016 juga dilakukan penghematan anggaran terkait dengan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) atas belanja-belanja yang secara teknis maupun administratif harus dilakukan penghematan. Adapun besarnya SILPA pada tahun anggaran 2016 ini adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
SILPA Total APBD dan APBN
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2016

| No | Sumber Anggaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | SILPA*) | |
|----|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | TOTAL | 71.097.795.842 | 62.833.046.831 | 8.264.749.011 | 11,62 |
| 1 | APBD | 44.495.611.842 | 43.433.436.071 | 1.062.175.771 | 2,39 |
| | Urusan Wajib | 19.061.928.000 | 18.331.068.711 | 730.859.289 | 3,83 |
| | Urusan Pilihan | 25.433.683.842 | 25.102.367.360 | 331.316.482 | 1,30 |
| 2 | APBN | 26.602.184.000 | 19.399.610.760 | 7.202.573.240 | 27,08 |
| | a. Tugas Pembantuan | 22.061.479.000 | 15.332.496.000 | 6.728.983.000 | 30,50 |
| | b. Dekonsentrasi | 4.540.705.000 | 4.067.114.760 | 473.590.240 | 10,43 |

3.1.5. Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Dalam upaya pencapaian target-target kinerja selama tahun 2016 ini, telah dialokasikan program/kegiatan sebagai berikut:

- 1 Dalam pencapaian Indikator (1) yaitu prosentase peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:

- 1) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM-IP).
- 2) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
- b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
 - 2) Kegiatan Pengembangan tanaman Semusim dan Rempah (TP).
- 2 Dalam pencapaian indikator (2) yaitu prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim (RAM-IP).
 - 2) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
 - 3) Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan
 - 4) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBHCHT).
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
 - 2) Kegiatan Pengembangan tanaman Semusim dan Rempah (TP).
- 3 Dalam pencapaian indikator (3) yaitu jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan.
 - 2) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan
 - 3) Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tembakau (DBHCHT)
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
 - 2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
 - 3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP)
- 4 Dalam pencapaian indikator (4) yaitu benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Peningkatan Produksi Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan.
 - 2) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
 - 3) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau (DBHCHT)
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan.

- 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
 - 2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).
 - 3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP).
- 5 Dalam pencapaian indikator (5) yaitu prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan
 - 2) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan
 - 3) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan
 - 4) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau (DBHCHT)
 - 5) Kegiatan CLTH – Pengembangan Tanaman Kelapa
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (DK).
 - 2) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (DK)
 - 4) Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (TP)
 - c. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
- 6 Dalam pencapaian indikator kinerja (6) yaitu Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R), dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
 - 2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
 - 3) Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan
 - 4) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM-IP)
 - 5) Kegiatan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT).
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP).
 - 2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP).

- 7 Dalam pencapaian Indikator kinerja (7) yaitu Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
 - 2) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
 - 3) Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau (DBHCHT)
 - b. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP).
- 8 Dalam pencapaian indikator kinerja (8) yaitu Jumlah Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan sistem jaminan mutu sesuai SNI, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
 - 2) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan
 - 3) Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil Tanaman Tembakau
 - 4) Kegiatan CLTH – Demplot Pengolahan Gula Merah
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP).
- 9 Dalam pencapaian indikator kinerja (9) yaitu Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan, dalam pelaksanaannya didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (APBN), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (TP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016, bahwa keseluruhan Program maupun Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, secara umum semuanya memiliki kontribusi yang baik terhadap upaya pencapaian target kinerja yang sudah ditentukan. Namun demikian dalam jangka ke depan perlu adanya upaya perbaikan substansi pada masing-masing kegiatan tersebut, agar lebih mengarah pada upaya pencapaian target kinerjanya, termasuk dengan ketersediaan anggaran yang memadai sesuai dengan target kinerja yang harus diwujudkan.

3.1.6. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, serta untuk menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018, maka untuk tahun anggaran 2017 telah direncanakan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

APBD 2017:

1. Program Pokok APBD TA. 2017

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas;
 - 2) Kegiatan Bimtek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan;
 - 3) Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan;
 - 4) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan;
 - 5) Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih;
 - 6) Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta;
 - 7) Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera;
 - 8) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi;
 - 9) Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan;
 - 10) Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger;
 - 11) Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger;
 - 12) Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger;
 - 13) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 14) Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi;
 - 15) Kegiatan DBHCHT – Uji Multi Lokasi Varietas Tembakau;
 - 16) Kegiatan DBHCHT – Bimtek Penangkar Tanaman Tembakau;
 - 17) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger;
 - 18) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum;
 - 19) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman;
 - 20) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih;
 - 21) Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - 22) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan;
 - 23) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau;
 - 24) Kegiatan DBHCHT – Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau;
 - 25) Kegiatan DBHCHT – Pengawasan Benih Tanaman Tembakau;

- 26) Kegiatan DBHCHT – Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Sulawesi Selatan;
- 27) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat;
- 28) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim;
- 29) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim Sesuai Good Agricultural Practice;
- 30) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice;
- 31) Kegiatan Bimtek Budidaya Tanaman Tahunan;
- 32) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan;
- 33) Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf;
- 34) Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi;
- 35) Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan;
- 36) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan;
- 37) Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan;
- 38) Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT;
- 39) Kegiatan DBHCHT – Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau;
- 40) Kegiatan DBHCHT – Demplot Tanaman Tembakau;
- 41) Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau;
- 42) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera;
- 43) Kegiatan Bimtek Budidaya Tanaman Semusim
- b. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian, dengan kegiatan:
 - 44) Kegiatan DBHCHT – Demplot Konservasi Lahan tembakau;
 - 45) Kegiatan DBHCHT – Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan;
 - 46) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika;
 - 47) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta;
 - 48) Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger;
 - 49) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan;
 - 50) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk, dan Cipunagara;
 - 51) Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim;
 - 52) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan;

- 53) Kegiatan CLTH – Sosialisasi Penanaman Kelapa
 - 54) Kegiatan CLTH – Pengembangan Kelapa
 - 55) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan
 - 56) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan;
 - 57) Kegiatan Bimtek Perkebunan;
 - 58) Kegiatan Rapat Kerja/Musyawarah Daerah Asosiasi;
 - 59) Kegiatan Bimtek Penguatan Kelembagaan;
 - 60) Kegiatan PENAS dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan;
 - 61) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan;
 - 62) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan;
 - 63) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan;
 - 64) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan;
 - 65) Kegiatan DBHCHT – Rapat Koordinasi/Musyawarah Daerah Asosiasi;
 - 66) Kegiatan DBHCHT – Peningkatan Wawasan;
 - 67) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan Penguatan Kelembagaan;
 - 68) Kegiatan DBHCHT – Diseminasi Budidaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau;
 - 69) Kegiatan DBHCHT – Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau;
 - 70) Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Poktan/Gapoktan serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger
- c. Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman dengan kegiatan:
- 71) Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT;
 - 72) Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT;
 - 73) Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP;
 - 74) Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati;
 - 75) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan;
 - 76) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT;
 - 77) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi;
 - 78) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman T e h;
 - 79) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kelapa;
 - 80) Kegiatan Penerapan Metode PHT pada Tanaman Teh;
 - 81) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT;
 - 82) Kegiatan Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi;

- 83) Kegiatan Pengendalian OPT pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan;
- 84) Kegiatan DBHCHT – Pengendalian OPT Tembakau;
- 85) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan APH Cair di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto;
- 86) Kegiatan DBHCHT – Pelatihan APH Cair di BPTP
- d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan:
 - 87) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI;
 - 88) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing;
 - 89) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau;
 - 90) Kegiatan DBHCHT – Konsultasi, Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau;
 - 91) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu sesuai SNI;
 - 92) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil;
 - 93) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil;
 - 94) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan;
 - 95) Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH;
 - 96) Kegiatan Bandung Tea Festival;
 - 97) Kegiatan Jabar Lautan Kopi;
 - 98) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar;
 - 99) Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 100) Kegiatan HPS Tingkat Nasional;
 - 101) Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat;
 - 102) Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP;
 - 103) Kegiatan Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee;
 - 104) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
 - 105) Kegiatan Partisipasi Pameran Provinsi;
 - 106) Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar;
 - 107) Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan;
 - 108) Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan;
 - 109) Kegiatan Konsultasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembinaan Usaha;
 - 110) Kegiatan CLTH – Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah;
 - 111) Kegiatan CLTH – Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah;
 - 112) Kegiatan CLTH – Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah;

- 113) Kegiatan CLTH – Pembinaan Pengawasan Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh;
- 114) Kegiatan Demplot Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Kopi Arabika Java Preanger;
- 115) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakhstan;
- 116) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kanada (USA);
- 117) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri;
- 118) Kegiatan Perbanyak Buku Kopi;
- 119) Kegiatan Perbanyak Buku Teh;
- 120) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat;
- 121) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional

2. Program Penunjang APBD TA. 2016

- e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
 - 122) Kegiatan Forum OPD Bidang Perkebunan;
 - 123) Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan;
 - 124) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017;
 - 125) Kegiatan Forum Sinkronisasi Perencanaan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - 126) Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olahraga dan Senam;
 - 127) Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan;
 - 128) Kegiatan Penyediaan Sewa Olahraga;
 - 129) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olahraga;
 - 130) Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop dan Bimtek;
 - 131) Kegiatan Pelaksanaan General Check Up;
 - 132) Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - 133) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 134) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 135) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 136) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 137) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 138) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 139) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - 140) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir

- 141) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 142) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 143) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 144) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 145) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 146) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 147) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP;
- 148) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP
- 149) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 150) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 151) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 152) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 153) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 154) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 155) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP;
- 156) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB;
- 157) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB;
- 158) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB;
- 159) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB;
- 160) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB;

- 161) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB;
- 162) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - 163) Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa;
 - 164) Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior;
 - 165) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vandel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir;
 - 166) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari;
 - 167) Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan;
 - 168) Kegiatan Penyediaan Radio SSB;
 - 169) Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar;
 - 170) Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar
 - 171) Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar
 - 172) Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 173) Kegiatan Rehabilitasi Kantor Sub Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 174) Kegiatan Pemasangan Paving Block Kantor Sub Unit UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 175) Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 176) Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 177) Kegiatan Penyediaan Mesin Pengukus Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 178) Kegiatan Penyediaan Mesin Pengolah Minyak Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 179) Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar;
 - 180) Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar
 - 181) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP;
 - 182) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP;
 - 183) Kegiatan Kontruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP;
 - 184) Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP;
 - 185) Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Wudhu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong UPTD BPBTP;
 - 186) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP;
 - 187) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP;

- 188) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP;
- 189) Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP;
- 190) Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP;
- 191) Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP;
- 192) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium UPTD BPBTP;
- 193) Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP;
- 194) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB;
- 195) Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB;
- 196) Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB;
- 197) Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur - UPTD BSPMB;
- 198) Kegiatan Pembuatan Rumah Kassa Korwil Cianjur - UPTD BSPMB;
- 199) Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur - UPTD BSPMB;
- 200) Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya - UPTD BSPMB;
- 201) Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB;
- 202) Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB
- i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - 203) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - 204) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 205) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;
 - 206) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor BPTP;
 - 207) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP
 - 208) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP;
 - 209) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP;
 - 210) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPBTP;
 - 211) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP;
 - 212) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB;
 - 213) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BSPMB;
 - 214) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB;
- j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - 215) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - 216) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - 217) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

- 218) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
- 219) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- 220) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- 221) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Aset Keuangan
- k. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan kegiatan:
 - 222) Kegiatan DBHCHT – Pertemuan Teknis Penyusunan Data/Informasi Tembakau Jawa Barat;
 - 223) Kegiatan DBHCHT – Benchmarking Data/Informasi Tembakau ke NTB;
 - 224) Kegiatan DBHCHT – Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat;
 - 225) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan;
 - 226) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik;
 - 227) Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016;
 - 228) Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017;
 - 229) Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional;
 - 230) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan;
 - 231) Kegiatan Publikasi Data/Informasi Perkebunan;
 - 232) Kegiatan Pengolahan Data Statistik

APBN

- 1. **Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN:**
 - a. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP)
 - 2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP)
 - 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP)
 - 4) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - 5) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 6) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
- 2. **Program dan Kegiatan Dekonsentrasi yang difasilitasi dari APBN:**
 - b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:
 - 7) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (DK);
 - 8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (DK).
 - 9) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (DK)

3.2 Akuntabilitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan perkebunan Jawa Barat pada Tahun 2016 didukung melalui dana APBD maupun APBN. Dalam pelaksanaannya alokasi anggaran tersebut ada yang terkait langsung dengan upaya pencapaian target kinerja, ada pula yang berfungsi sebagai penunjang. Adapun uraian anggaran selengkapnya dijelaskan berikut ini:

3.2.1 Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBD

Dalam mewujudkan program/kegiatan pembangunan perkebunan pada tahun 2016 Dinas Perkebunan mendapat Total alokasi APBD sebesar **Rp. 44.495.611.842,-** dengan Realisasi keuangan sebesar **Rp 43.433.436.071 (97,61%)** dan capaian fisiknya sebesar **99,96%**. Data selengkapnya mengenai anggaran dan realisasi APBD 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan
APBD Provinsi Jawa Barat TA. 2016**

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisk |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | | | (Rp) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | TOTAL APBD 2016 | 61.675.096.223 | 60.406.344.348 | 97,94 | 99,97 |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji + Tunj) | 17.179.484.381 | 16.972.908.277 | 98,80 | 100,00 |
| | TOTAL ANGGARAN (WAJIB + PILIHAN) | 44.495.611.842 | 43.433.436.071 | 97,61 | 99,96 |
| | TOTAL URUSAN WAJIB | 19.061.928.000 | 18.331.068.711 | 96,17 | 99,90 |
| a. | Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah | 465.000.000 | 461.178.100 | 99,18 | 100,00 |
| 1) | Kegiatan Perencanaan di Dinas Perkebunan | 465.000.000 | 461.178.100 | 99,18 | 100,00 |
| b. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 968.500.000 | 861.036.000 | 88,90 | 99,03 |
| 2) | Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur | 968.500.000 | 861.036.000 | 88,90 | 99,03 |
| c. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.087.038.000 | 2.870.944.572 | 93,00 | 100,00 |
| 3) | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran | 1.464.200.000 | 1.398.883.955 | 95,54 | 100,00 |
| 4) | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) | 473.800.000 | 424.418.216 | 89,58 | 100,00 |
| 5) | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) | 689.038.000 | 681.013.772 | 98,84 | 100,00 |
| 6) | Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) | 460.000.000 | 366.628.629 | 79,70 | 100,00 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016*

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisk |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | (Rp) | (%) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 9.608.525.000 | 9.264.745.334 | 96,42 | 99,90 |
| 7) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.001.343.750 | 983.838.100 | 98,25 | 100,00 |
| 8) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan | 1.283.643.750 | 1.174.564.000 | 91,50 | 100,00 |
| 9) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan | 1.069.343.750 | 1.048.975.675 | 98,10 | 99,29 |
| 10) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan | 854.193.750 | 828.310.900 | 96,97 | 100,00 |
| 11) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) DAK | 2.025.000.000 | 1.900.916.500 | 93,87 | 100,00 |
| 12) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) DAK | 2.250.000.000 | 2.232.205.659 | 99,21 | 99,90 |
| 13) | Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) DAK | 1.125.000.000 | 1.095.934.500 | 97,42 | 100,00 |
| e. | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.846.500.000 | 3.800.240.325 | 98,80 | 100,00 |
| 14) | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | 1.350.000.000 | 1.343.805.950 | 99,54 | 100,00 |
| 15) | Kegiatan Pemeliharaan Sarana Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) | 900.000.000 | 880.004.500 | 97,78 | 100,00 |
| 16) | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan (BPBTP) | 891.000.000 | 886.386.775 | 99,48 | 100,00 |
| 17) | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMB) | 500.000.000 | 472.416.583 | 94,48 | 100,00 |
| f. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 376.550.000 | 372.654.180 | 98,97 | 100,00 |
| 18) | Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan | 278.550.000 | 275.184.180 | 98,79 | 100,00 |
| 19) | Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perkebunan | 98.000.000 | 97.470.000 | 99,46 | 100,00 |
| g. | Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah | 709.815.000 | 700.270.200 | 98,66 | 100,00 |

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016*

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisk |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | | | (Rp) | (%) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20) | Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan | 709.815.000 | 700.270.200 | 98,66 | 100,00 |
| | TOTAL URUSAN PILIHAN | 25.433.683.842 | 25.102.367.360 | 98,70 | 100,00 |
| a. | Program Peningkatan Produksi Pertanian | 14.080.739.792 | 13.939.184.754 | 98,99 | 100,00 |
| 1) | Kegiatan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan | 7.929.687.016 | 7.896.123.830 | 99,58 | 100,00 |
| 2) | Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan | 469.577.776 | 461.845.144 | 98,35 | 100,00 |
| 3) | Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan | 875.500.000 | 853.096.500 | 97,44 | 100,00 |
| 4) | Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan | 995.000.000 | 989.133.000 | 99,41 | 100,00 |
| 5) | Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim | 899.200.000 | 864.469.000 | 96,14 | 100,00 |
| 6) | Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan | 993.175.000 | 981.088.000 | 98,78 | 100,00 |
| 7) | Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan | 473.000.000 | 467.133.000 | 98,76 | 100,00 |
| 8) | Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau | 498.000.000 | 494.104.100 | 99,22 | 100,00 |
| 9) | Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tembakau | 460.600.000 | 459.100.180 | 99,67 | 100,00 |
| 10) | Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Tembakau | 487.000.000 | 473.092.000 | 97,14 | 100,00 |
| b. | Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian | 6.005.710.000 | 5.947.596.631 | 99,03 | 100,00 |
| 11) | Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan | 998.100.000 | 995.431.613 | 99,73 | 100,00 |
| 12) | Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan | 473.300.000 | 470.453.000 | 99,40 | 100,00 |
| 13) | Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya dan Gangguan Usaha Perkebunan | 999.000.000 | 985.209.000 | 98,62 | 100,00 |
| 14) | Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau (DBHCHT) | 499.360.000 | 498.855.000 | 99,90 | 100,00 |
| 15) | Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan | 493.200.000 | 492.663.600 | 99,89 | 100,00 |
| 16) | Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM IP) | 988.720.000 | 988.322.000 | 99,96 | 100,00 |
| 17) | Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan | 460.970.000 | 460.150.000 | 99,82 | 100,00 |
| 18) | Kegiatan Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBHCHT) | 452.940.000 | 448.290.000 | 98,97 | 100,00 |

| No. | Kegiatan | Anggaran | Realisasi Keuangan | | Realisasi Fisk |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | (Rp) | (%) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19) | Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan | 440.650.000 | 414.055.918 | 93,96 | 100,00 |
| 20) | Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa (CLTH) | 199.470.000 | 194.166.500 | 97,34 | 100,00 |
| c. | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan | 1.459.276.050 | 1.424.715.565 | 97,63 | 100,00 |
| 21) | Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu | 491.629.000 | 482.608.600 | 98,17 | 100,00 |
| 22) | Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau (DBHCHT) | 472.470.000 | 458.725.875 | 97,09 | 100,00 |
| 23) | Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi Pengendalian Hama Terpadu | 495.177.050 | 483.381.090 | 97,62 | 100,00 |
| d. | Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan | 3.887.958.000 | 3.790.870.410 | 97,50 | 100,00 |
| 24) | Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan | 450.000.000 | 442.955.000 | 98,43 | 100,00 |
| 25) | Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan | 2.875.958.000 | 2.787.440.410 | 96,92 | 100,00 |
| 26) | Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan | 462.000.000 | 461.180.000 | 99,82 | 100,00 |
| 27) | Kegiatan Demplot Pengolahan Gula Merah (CLTH) | 100.000.000 | 99.295.000 | 99,30 | 100,00 |

3.2.2. Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN

Pada Tahun Anggaran 2016 dana APBN yang diterima Dinas Perkebunan disalurkan melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Satker 05), dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana (Satker 08), dengan klasifikasi berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK).

Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar **Rp 22.061.479.000,-**, dengan realisasi sebesar **Rp 15.332.496.000,-** atau sekitar **69,50 %** dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Sedangkan Dana Dekonsentrasi (DK) yang diterima Dinas Perkebunan adalah sebesar **Rp 4.540.705.000,-**, dengan realisasi sebesar **Rp 4.067.114.760,-** atau sekitar **89,57%**, dengan realisasi fisik sebesar **100%**. Secara keseluruhan dana APBN yang diterima Tahun 2016 adalah sebesar **Rp 26.602.184.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 19.399.610.760** atau sebesar **72,92%** dengan realisasi fisiknya sebesar **100%**.

Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran APBN melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi (DK) sub sektor perkebunan Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Program/Kegiatan APBN
Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2016

| PROGRAM/ KEGIATAN/ URAIAN | | Jumlah Anggaran | Realisasi Keuangan | | Realisasi |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|-----------|
| | | | (Rp) | (%) | (Fisik) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTAL | | 22.061.479.000 | 15.332.496.000 | 69,50 | 100,00 |
| Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (05) Ditjen Perkebunan | | 21.244.979.000 | 14.526.566.000 | 68,42 | 100,00 |
| Program Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | | 21.244.979.000 | 14.526.566.000 | 68,42 | 100,00 |
| 1 | Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar (TP) | 10.927.469.000 | 8.142.416.000 | 74,51 | 100,00 |
| 2 | Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan (TP) | 3.415.750.000 | 3.196.065.000 | 93,57 | 100,00 |
| 3 | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan (TP) | 737.920.000 | 736.980.000 | 99,87 | 100,00 |
| 4 | Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah (TP) | 5.194.000.000 | 1.582.829.000 | 30,47 | 100,00 |
| 5 | Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 601.900.000 | 510.272.000 | 84,78 | 100,00 |
| 6 | Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan (TP) | 367.940.000 | 169.790.000 | 47,43 | 100,00 |
| Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (08) Ditjen PSP | | 816.500.000 | 805.930.000 | 98,73 | 100,00 |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | | 816.500.000 | 805.930.000 | 98,73 | 100,00 |
| 1 | Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP) | 400.000.000 | 400.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP | 416.500.000 | 405.930.000 | 97,46 | 100,00 |

BAB IV PENUTUP

Visi Dinas Perkebunan yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2013-2018 yaitu **“Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”**, telah dijabarkan kedalam 3 Misi dengan 3 tujuan, 7 Sasaran Strategis, 9 Indikator Sasaran Strategis, 9 Strategi, 9 Kebijakan, 11 Program dan 45 Kegiatan APBD, dan 3 Program dengan 22 Kegiatan APBN, dengan struktur indikator kinerja sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan, dengan tujuan:

1. Meningkatkan Ketersediaan Produk Perkebunan Secara Optimal Dan Berkualitas, dengan sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan indikator sasaran:
 - 1) Prosentase peningkatan produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan;
 - 2) Prosentase peningkatan produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan;
 - b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator sasaran:
 - 3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis;
 - 4) Prosentase peningkatan benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi;

Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan, dengan tujuan:

2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan sasaran strategis:
 - c. Terkendalinya sumber daya lahan perkebunan, dengan indikator sasaran:
 - 5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat
 - d. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan, dengan indikator sasaran:
 - 6) Prosentasi peningkatan indeks nilai tukar petani perkebunan rakyat (NTP-R)
 - e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:
 - 7) Prosentase penurunan intensitas serangan opt perkebunan

Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan, dengan tujuan:

3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:
 - f. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI;
 - 8) Prosentase peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI
 - g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan.

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya difasilitasi melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 44.495.611.842,- yang dijabarkan kedalam 11 (sebelas) Program dengan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp. 26.602.184.000,- yang dijabarkan kedalam 2 (dua) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan.

Adapun realisasi anggaran tersebut untuk dana APBD adalah sebesar Rp 43.433.436.071 (97,61%) dan capaian fisiknya sebesar 99,96%. Sedangkan realisasi dana APBN adalah sebesar Rp 19.399.610.760 atau sebesar 72,92% dengan realisasi fisiknya sebesar 100%.

Berdasarkan hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategik, diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja 2016 yang diperjanjikan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 99,28%.
2. Hasil pengukuran perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015, diperoleh nilai rata-rata sebesar 102,35%.
3. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja Renstra berdasarkan hasil capaian sampai dengan tahun 2016 atau tahun ketiga Renstra, diperoleh nilai rata-rata sebesar 62,71%, artinya bahwa target akhir Renstra pada tahun 2018 cukup optimis untuk tercapai secara optimal (>100%).
4. Hasil pengukuran perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan capaian kinerja Nasional, diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan capaian indikator provinsi memiliki kesetaraan nilai yang wajar terhadap capaian kinerja Nasional dengan total nilai sebesar 93,24%, dimana beberapa capaian indikator provinsi mampu melebihi capaian indikator kinerja nasional.

Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan sub sektor perkebunan selama tahun 2016 umumnya bersifat teknis dan non teknis, antara lain berupa:

- Masih belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan paket teknologi budidaya komoditas perkebunan;
- Masih terbatasnya kebun sumber benih bina dan nonbina untuk pengembangan produksi benih berkualitas yang dibutuhkan para pelaku usaha perkebunan di Jawa Barat.
- Masih tingginya alih fungsi lahan dan alih komoditas serta Gangguan Usaha Perkebunan
- Masih belum optimalnya capaian kinerja SDM dan Kelembagaan pelaku usaha perkebunan;
- Masih luasnya wilayah yang terindikasi serangan Organisme Pengganggu Tanaman;
- Masih belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan sesuai SNI;

- Masih rendahnya volume ekspor produk perkebunan Jawa Barat.

Berbagai kendala/permasalahan tersebut solusinya terus diupayakan melalui peningkatan koordinasi dan konsultasi antar unit kerja terkait, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan ketersediaan dan sumber daya yang dimiliki.

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015*

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015*

